



Peran Dan Efektivitas Pemerintahan Daerah Serta Lembaga Sosial Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Dikabupaten Gorontalo

Dewi Walahe¹, Andre Mopili², Yeca S Rahman³, Anjelika Karim⁴, Yulianti Datukramat⁵, Ficky Popalia⁶

Universitas Gorontalo, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: : dewi.walahe31@gmail.com, yecasrahman@gmail.com, angelikakarim88@gmail.com, andremopili689@gmail.com, yuliantidatukramat08@gmail.com, fickypopaliaindonesia26@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Early marriage remains a significant social problem in Gorontalo Regency, with a prevalence exceeding the national average. This phenomenon is influenced by economic factors, cultural norms, and limited access to education, which adversely affect reproductive health, educational continuity, and intergenerational poverty. This study aims to analyze the role of local government and social institutions in efforts to reduce early marriage rates in Gorontalo Regency. This study employs a qualitative approach through a literature review by utilizing secondary data obtained from policy documents, reports from the Central Bureau of Statistics, publications of relevant government agencies, and scholarly articles. Data were analyzed using a descriptive qualitative method to identify forms of intervention and patterns of collaboration among stakeholders. The findings indicate that the Government of Gorontalo Regency has implemented various policies and programs, including early marriage prevention regulations, compulsory twelve-year education, scholarships for female students, family economic empowerment initiatives, and adolescent reproductive health services. Social institutions contribute through policy advocacy, religious-based approaches, legal assistance, and community-based public campaigns. Synergy between the government and social institutions has contributed positively to early marriage prevention efforts, although significant challenges remain, such as strong social norms, poverty, and limited access to services. This study emphasizes that multi-stakeholder, community-based collaboration is a crucial strategy for reducing early marriage rates in Gorontalo Regency. **Keywords:** early marriage¹, government role², social institutions³, prevention, Gorontalo

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang signifikan di Kabupaten Gorontalo dengan prevalensi yang berada di atas rata-rata nasional. Fenomena ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan keterbatasan akses pendidikan yang berdampak pada kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, dan kemiskinan antargenerasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah daerah dan lembaga sosial dalam upaya penurunan angka pernikahan dini di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari dokumen kebijakan, laporan Badan Pusat Statistik, publikasi dinas terkait, dan artikel ilmiah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk

mengidentifikasi bentuk intervensi dan pola kolaborasi antarpemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program, antara lain regulasi pencegahan pernikahan dini, pendidikan wajib 12 tahun, beasiswa bagi perempuan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta layanan kesehatan reproduksi remaja. Lembaga sosial berperan melalui advokasi kebijakan, pendekatan keagamaan, pendampingan hukum, dan kampanye publik berbasis komunitas. Sinergi antara pemerintah dan lembaga sosial berkontribusi positif terhadap upaya pencegahan pernikahan dini, meskipun masih dihadapkan pada tantangan berupa norma sosial yang kuat, kondisi kemiskinan, dan keterbatasan akses layanan. Penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi multipihak berbasis komunitas menjadi strategi penting dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Gorontalo.

Kata Kunci: pernikahan dini¹, peran pemerintah², lembaga sosial³, pencegahan, Gorontalo

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang bersifat multidimensional dan kompleks karena dipengaruhi oleh interaksi faktor budaya, ekonomi, pendidikan, serta kelembagaan. Praktik ini berdampak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia, terutama melalui terhambatnya akses pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, serta melemahnya kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam jangka panjang, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap reproduksi kemiskinan antargenerasi (Novitasari & Firmansyah, 2025). Di Kabupaten Gorontalo, pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang menonjol akibat kuatnya nilai budaya lokal, keterbatasan kondisi ekonomi rumah tangga, serta belum meratanya akses dan kualitas pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak dapat dipahami semata sebagai keputusan individual, melainkan sebagai persoalan struktural yang menuntut intervensi kebijakan publik yang kontekstual dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya mengkaji pernikahan dini dari perspektif kesehatan reproduksi, pendidikan, dan sosial-budaya, dengan penekanan pada faktor risiko, dampak individual, serta perubahan perilaku masyarakat. Sejumlah studi juga menyoroti pentingnya edukasi dan sosialisasi sebagai strategi utama pencegahan. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih terbatas pada analisis normatif dan belum secara mendalam menempatkan pernikahan dini sebagai persoalan tata kelola kebijakan publik, khususnya terkait efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah serta pola koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga sosial. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan antara desain kebijakan yang bersifat normatif dengan praktik implementasi di tingkat daerah, terutama dalam aspek kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan keberlanjutan program pencegahan (Heryani et al., 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang memposisikan pernikahan dini sebagai persoalan tata kelola kebijakan publik di tingkat daerah, dengan menekankan pada peran, efektivitas, serta sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga sosial dalam konteks lokal. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kebijakan secara normatif, tetapi juga menganalisis implementasi kebijakan, mekanisme koordinasi antarlembaga,

serta kemampuan intervensi pemerintah dan lembaga sosial dalam menjawab faktor-faktor struktural yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran dan efektivitas pemerintah daerah serta lembaga sosial dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Gorontalo, guna memberikan kontribusi empiris dan praktis bagi penguatan tata kelola kebijakan daerah yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran pemerintah daerah dan lembaga sosial dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Gorontalo, khususnya pada beberapa desa dan kecamatan yang memiliki prevalensi pernikahan dini relatif tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan laporan pemerintah daerah. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan kontekstual bahwa wilayah dengan prevalensi tinggi memberikan ruang analisis yang lebih kaya terhadap dinamika kebijakan dan praktik pencegahan pernikahan dini. Subjek penelitian dalam studi ini adalah informan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam perumusan dan implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini. Informan penelitian meliputi pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga remaja, serta perwakilan lembaga sosial yang aktif dalam program perlindungan anak. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria utama informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam isu pernikahan dini di tingkat daerah dan komunitas. Untuk memperluas informasi dan memperdalam data, teknik snowball sampling juga digunakan apabila diperlukan. Jumlah informan ditentukan secara fleksibel hingga mencapai titik kejenuhan data (data saturation), yaitu ketika tidak ditemukan informasi baru yang signifikan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta persepsi informan terkait kebijakan dan praktik pencegahan pernikahan dini. Observasi partisipatif digunakan untuk memahami konteks sosial dan interaksi antaraktor di tingkat komunitas. Studi dokumentasi mencakup analisis terhadap dokumen kebijakan daerah, laporan program pemerintah, serta data statistik yang relevan dengan isu pernikahan dini. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis dilakukan sejak tahap pengumpulan data hingga penelitian berakhir, sehingga memungkinkan peneliti melakukan pendalaman dan klarifikasi data secara simultan. Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode, dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data. Selain itu, prinsip credibility dijaga melalui ketekunan pengamatan dan konfirmasi data kepada informan, sedangkan dependability dicapai melalui pencatatan proses penelitian secara

sistematis. Confirmability dijaga dengan memastikan bahwa temuan penelitian didasarkan pada data empiris, bukan pada bias atau asumsi peneliti. Penelitian ini melibatkan subjek manusia dan telah memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian. Seluruh informan memberikan persetujuan secara sadar (*informed consent*) sebelum proses pengumpulan data dilakukan. Identitas informan dijaga kerahasiaannya dan data yang diperoleh digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik. Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan, sukarela, dan perlindungan terhadap informan, serta telah memperoleh persetujuan dari pihak berwenang atau komite etik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah dengan karakteristik sosial budaya yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional, terutama dalam struktur keluarga dan relasi sosial masyarakat pedesaan. Pola kehidupan komunal, ikatan kekerabatan yang erat, serta peran dominan tokoh adat dan tokoh agama menjadikan norma sosial memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan keluarga, termasuk keputusan terkait usia perkawinan. Kondisi ini menjadikan praktik pernikahan dini tidak semata dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi seringkali dianggap sebagai solusi sosial terhadap persoalan ekonomi, kehormatan keluarga, dan tekanan budaya.

Dari aspek demografis, wilayah penelitian didominasi oleh kelompok usia produktif dengan tingkat pendidikan yang relatif belum merata. Akses terhadap pendidikan menengah dan pendidikan kesehatan reproduksi masih terbatas di beberapa desa, sehingga pemahaman remaja dan orang tua mengenai risiko pernikahan dini belum sepenuhnya komprehensif. Selain itu, faktor ekonomi keluarga yang rentan memperkuat kecenderungan orang tua untuk menikahkan anak pada usia muda sebagai strategi bertahan hidup. Konteks ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kabupaten Gorontalo merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi faktor struktural, kultural, dan ekonomi.

Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan pencegahan melalui kampanye, sosialisasi, serta kolaborasi dengan dinas terkait dan tokoh masyarakat. Namun, masih terdapat kendala seperti minimnya sumber daya, keterbatasan penegakan regulasi, serta rendahnya dukungan keluarga dan masyarakat dalam program pencegahan (Tri Maharani & Kholifah, 2025).

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pencegahan pernikahan dini melalui fungsi regulatif, fasilitatif, dan edukatif. Dalam konteks regulasi, pemerintah daerah telah merumuskan kebijakan dan program yang mengacu pada perlindungan anak dan peningkatan kualitas keluarga, termasuk melalui sosialisasi batas usia perkawinan dan penguatan peran keluarga. Implementasi kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk penyuluhan, kampanye publik, serta integrasi isu pernikahan dini dalam program pembangunan sosial.

Selain itu, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan ruang koordinasi lintas sektor antara dinas terkait, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, serta belum meratanya jangkauan program ke seluruh wilayah desa. Hal ini berdampak pada belum optimalnya capaian kebijakan dalam menurunkan angka pernikahan dini secara signifikan.

Peran Lembaga Sosial dan Komunitas Lokal

Lembaga sosial dan komunitas lokal berperan sebagai aktor penting dalam pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan berbasis nilai dan kedekatan sosial dengan masyarakat. Lembaga keagamaan, organisasi kepemudaan, dan LSM lokal memiliki posisi strategis karena dipercaya oleh masyarakat dan mampu menyampaikan pesan-pesan pencegahan secara persuasif. Melalui kegiatan penyuluhan, pendampingan keluarga, dan dialog komunitas, lembaga sosial berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran mengenai dampak negatif pernikahan dini terhadap masa depan anak.

Pendekatan yang dilakukan lembaga sosial cenderung lebih kontekstual dan adaptif terhadap budaya lokal, sehingga pesan pencegahan dapat diterima dengan lebih baik. Meskipun demikian, peran lembaga sosial masih menghadapi keterbatasan dalam hal pendanaan, kapasitas organisasi, serta keterhubungan yang sistematis dengan program pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan kontribusi lembaga sosial belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka kebijakan pencegahan yang bersifat struktural.

Efektivitas Program Pencegahan

Efektivitas program pencegahan pernikahan dini dapat dilihat dari pencapaian tujuan jangka pendek dan dampak jangka panjang yang dihasilkan. Pada level output, program pemerintah dan lembaga sosial telah berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai batas usia perkawinan dan risiko pernikahan dini. Peningkatan kesadaran ini terlihat dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.

Namun, pada level outcome dan impact, efektivitas program masih belum optimal. Perubahan perilaku masyarakat berlangsung secara bertahap dan menghadapi resistensi dari norma budaya yang telah mengakar. Faktor ekonomi keluarga, tekanan sosial, dan minimnya alternatif pendidikan atau pekerjaan bagi remaja menjadi penghambat utama dalam mewujudkan dampak kebijakan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh intensitas sosialisasi, tetapi juga oleh kemampuan program dalam menjawab akar permasalahan sosial.

Kolaborasi Antar Lembaga

Kolaborasi antar lembaga merupakan elemen kunci dalam keberhasilan pencegahan pernikahan dini. Pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perlindungan anak. Sinergi yang efektif memungkinkan pertukaran informasi, penguatan kapasitas, serta penyelarasan program agar tidak berjalan secara sektoral.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar lembaga di Kabupaten Gorontalo masih bersifat sporadis dan belum terinstitusionalisasi secara formal. Koordinasi seringkali bergantung pada inisiatif individu atau momentum tertentu, tanpa mekanisme evaluasi dan perencanaan bersama yang berkelanjutan. Kondisi ini membatasi potensi kolaborasi dalam menghasilkan dampak yang lebih luas dan sistematis.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan pencegahan pernikahan dini dan lembaga sosial sebagai mitra dalam implementasi edukasi dan pemberdayaan. Namun, efektivitas program masih terkendala oleh faktor budaya, keterbatasan sumber daya, dan kolaborasi lintas sektor yang belum optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Azizah, A. N., Kurniawan, A. M., & Oktaviani, F. (2020). Penyuluhan Bahaya dan Pencegahan Pernikahan Dini Bersama Warga Desa Patimuan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 2(3), 11–16. <https://doi.org/10.57214/pengabmas.v2i3.248>
- Heryani, W., & al., et. (2021). The role of local government in preventing early childhood marriage. *Awang Long Law Review*, 4(1). <https://doi.org/10.56301/awl.v4i1.249>
- Lestari, F. (2024). Collaborative Governance in Reducing Early Age Marriage Rates in Meranti Islands Regency. *Proceeding International Conference on Economic and Social Sciences*, 2, 674–685. <https://icess.uin-suska.ac.id/index.php/1/article/view/199>
- Novitasari, R., & Firmansyah, M. (2025). Pernikahan dini: tinjauan hukum dan dampaknya. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.55681/seikat.v4i2.1637>
- Parmana, P. E., & al., et. (2025). Child marriage prevention policy: a study on role of local governments. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 4(9). <https://doi.org/10.55927/fjas.v4i9.323>
- Tri Maharani, S., & Kholifah, E. (2025). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pernikahan dini. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(6). <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v4i6.4719>